

DAFTAR PUTSAKA

A. Buku

- Alting, H. (2010). Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Pemilikan Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah. *Risalah Hukum*.
- Boedi Harsono. (2002). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Edisi Revisi. In *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*.
- Deden Sumantry, Subarsyah, W. P. R. (2021). Legal Properties of Indemnity As Prevention of Ownership and Implementation of Conversion of Land Rights Based on Law Number 5 Year 1960 Concerning Agrary Basics. *International Journal of Latin Notary*, 1 No.2(2), 51–71. <https://i-latinnotary.notariat.unpas.ac.id/index.php/jurnal/article/view/10>
- Effendi Perangin. (1986). Hukum Agraria di Indonesia. In *Rajawali*.
- Hasanah, U. (2013). Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Hernawan, D. (2016). PENGADAAN TANAH DENGAN CARA JUAL BELI OLEH INSTANSI PEMERINTAH MENURUT PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945. *LITIGASI*, 16(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.53>
- Kusumaatmadja, M. (1976). HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN MASYARAKAT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(5). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no5.713>
- Peter R. Senn. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Samekto, F. A. (2019). MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS KELSEN TENTANG STUFENBEAUTHEORIE DALAM PENDEKATAN NORMATIF-FILOSOFIS. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1). <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Santoso, U. (2019). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. In *Kencana*.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan:

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
HIR atau Herzine Indonesia Reglement
Undang – Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan – Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan – Pengadilan Sipil.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat
Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Yurisprudensi:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 2016.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960.